

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edy Gunawan, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Cendekia, 2018)
- Hamud. M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012)
- Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal : Panduan bagi Para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013)
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019)
- J. Satrio, *Perwakilan dan Kuasa* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- M.Irsan Nasarudin, *et.al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014)
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Munir Fuady, *Hukum Pailit: Teori dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Pasar Modal 2023* (Jakarta: OJK, 2023)
- Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Kontan Publishing, 2023)
- Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Universitas Atma Jaya Jogjakarta), 2015
- Sutan Remy Sjahdenini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Zainal Asikin dan Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Jurnal:

Agitha Putri Andany Hidayat dan Anita Afriana. “Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.3 (2021): 19–36. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.564>.

Agustinus. Soetrisno, “*Corporate Social Responsibility (CSR) Efficiency Approach with the Establishment of a State Institution Managing Funding and CSR Programs.*” *Global Legal Review*, Vol.1 (2021): 68-87. DOI: <https://doi.org/10.19166/blr.v1i1.2809>.

Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol.03 (2018): 258-268. DOI: [10.24843/AC.2018.v03.i02.p03](https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i02.p03).

Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “ Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.28 (2021): 636-656. DOI: [10.20885/iustum.vol28.iss2.art9](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9).

Elvira Fitriyani Pakpahan, Tyson Terbit Simbolon, Fibert Lovano, Elisah Elisah, and Giovanni Thomasia. “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vo.14 (2019): 302–15. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1921>.

Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela. “Peran OJK Dalam Melindungi Pemegang *Medium Term Notes* Melalui Penerbitan Pojk Nomor 30 Tahun 2019.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.8 (2020): 1313-1323. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i09.p02>.

Khirurridho Al Qeis dan Arman Nefi. “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol.10(2022): 1274-1296. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p05>

Nazarudin. “Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.11 (2004): 65–73. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art5>.

- Niru Anita Sinaga,. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol.10(2019): 1-20. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.
- Niru Anita Sinaga. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” Binamulia Hukum, Vol.7 (2018): 107–20. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.
- Putu Eka Trisna Dewi, “Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol.1(2019): 280-291. DOI: <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Sherly Angelina Chandra, *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar Dalam Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes* Dari Aspek Hukum Perdata Dan Hukum Pidana”, Jurnal Universitas Pancasila, Vol. 7 (2021) : 97-115. DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v7i1.2406>
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan
- Yosephus Mainake. “Aspek Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Sebagai *Trusts*” Law Review, Vol. 20(2020): 246–69. DOI: <https://dx.doi.org/10.19166/lr.v20i2.2757>.
- Yulia Qamariyanti, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksa Dana,” Jurnal Media Hukum, Vol.16 (2009): 134-145. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.v16i1.15476>

Skripsi/Tesis:

- Anang Seputro, “Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam hal Terjadinya *Redemption* pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif,” Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012
- Durma Jaya, “Perlindungan Investor Pemegang Obligasi Dalam Kepailitan Emiten: Studi Kasus PT. Infoasia Teknologi Global Tbk”. Skripsi, Depok: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
- Kusrini Handayani, “ Analisis Kontrak antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi Studi Kasus PT.X dan Bank Y Dalam Pembentukan Reksadana Syariah M di Indonesia.” Tesis, Depok: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

Maria Imelda Aritonang, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Penerbitan Obligasi, Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, 2008

Melanie Wijaya Oei, “ Kedudukan Hukum Pemegang Obligasi Sebagai Kreditor Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Tesis, Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

Rony Fauzi, “Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat dihadapan PPAT Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008)”, Tesis. Depok. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

Taufan Bagus A, “Kajian Yuridis Reksa Dana Yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trust Dalam Sistem Hukum Pasar Modal Indonesia”, Skripsi. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2009.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Lembaran 2014 Nomor 359)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 6231)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara 2016 Nomor 109)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (EBUS) Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (Lembaran Negara 2019 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6426)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 12)

Keputusan Mahkamah Agung 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan:

Putusan Nomor 286.PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga Jakarta Pusat

Website/Internet:

Indonesia Stock Exchange, “Apa itu Pasar Modal? Cek Yuk Fungsi, Contoh dan Manfaatnya”. <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-pasar-modal-cek-yuk-fungsi-contoh-dan-manfaatnya>, diakses pada 17 Juli 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Hai Calon Investor, Yuk Mengenal Jenis Pasar Modal.” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>, diakses pada 21 Agustus 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, “Jenis Investasi”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/63>, diakses pada 9 Agustus 2023.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Rexi Kilian Agrifa Kurator dan Advokat yang dilakukan secara tertulis tanggal 20 Oktober 2023.